

Aset Membengkak Rp1,1 Triliun

MEMPAWAH. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011 adanya penambahan total aset daerah. Dari Rp825,59 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1,118 triliun atau naik 35,47 persen.

Pembengkakan jumlah aset daerah itu sebagaimana disampaikan Bupati Pontianak H Ria Norsan pada sidang paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011 di Gedung DPRD, belum lama ini.

Dalam laporannya, bupati menyampaikan aset Pemerintah Kabupaten Pontianak, terdiri dari aset lancar sebesar Rp74,44 miliar, investasi jangka panjang sebesar Rp17,85 miliar, aset tetap sebesar Rp865,70 miliar dan aset lainnya Rp160,96 miliar.

Bertambahnya nilai aset tersebut berdampak terhadap kenaikan total ekuitas dana. Tercatat pertanggal 31 Desember 2011 ekuitas dana sebesar Rp1,118 triliun atau mengalami kenaikan sebesar nilai aset yakni 35,53 persen dari tahun sebelumnya. Terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp74,44 miliar dan ekuitas dana investasi sebesar Rp1,044 triliun. "Tingginya nilai aset ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pontianak belum



Wisma Chandramidi merupakan salah satu aset pemerintah Kabupaten Pontianak yang bernilai miliaran rupiah. Namun, sampai saat ini penggunaan aset tersebut belum difungsikan secara maksimal sesuai keperuntukannya

menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap," kata Norsan.

Ketua Fraksi P2KB DPRD Kabupaten Pontianak, Dody Azman menyayangkan kenaikan aset mencapai 35,47 persen tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah telah melakukan pemborosan anggaran yang jumlahnya cukup besar.

"Kenaikan aset sebesar 35,47 persen itu patut kita pertanyakan. Karena kenaikan yang ter-

jadi sangat signifikan mencapai ratusan miliar. Dalam bentuk apa saja aset tersebut kita juga belum mengetahuinya," tutur Dody kepada koran ini, Rabu (4/7) di Mempawah.

Akan lebih baik, timpal Legislator Partai Pemuda Indonesia (PPI) ini, apabila pemanfaatan anggaran ratusan miliar itu lebih diarahkan untuk kebijakan pembangunan yang lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat

dan daerah. Terutama pembangunan infrastruktur pedesaan.

"Harusnya pemerintah daerah lebih fokus pada perawatan dan pengelolaan aset yang ada. Karena selama ini pengelolaan aset di daerah ini tidak dilakukan dengan baik dan maksimal. Buktinya, masalah aset selalu menjadi temuan audit BPK," cecarnya.

Dody menuntut Pemerintah Kabupaten Pontianak segera menyelesaikan permasalahan aset.

Jangan dibiarkan berlarut-larut dan menjadi temuan BPK setiap tahun anggaran.

"Kinerja pengelola aset harus lebih dimaksimalkan. Kita sudah bosan mendengar masalah aset yang selalu menjadi temuan dan seakan tidak bisa diselesaikan," tegasnya.

Kabid Aset DPPKAD Kabupaten Pontianak, Makmur mengatakan, kenaikan itu merupakan total keseluruhan aset. Misalnya, aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang dan lainnya.

"Aset tetap merupakan pembelian barang yang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, peralatan dan mesin yang kenaikannya hanya berkisar 13,45 persen. Sedangkan yang paling berperan aktif yakni aset lancar. Misalnya yang masuk dalam kas daerah, piutang dan persediaan," ujarnya.

Makmur menjelaskan, kenaikan jumlah aset sebesar 35,47 persen tersebut juga disebabkan oleh adanya kegiatan proyek di Dinas Pendidikan yang jumlahnya cukup besar. Termasuk disebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

"Besarnya jumlah SILPA pada tahun 2010 juga memengaruhi laporan tahun 2011. Karena SILPA itu akan tetap tercatat pada tahun berikutnya. Sehingga akan terjadi penambahan," jelas Makmur. (shn)